

# HUBUNGAN REALISASI TRANSFER DAU DAN DAK TERHADAP KESENJANGAN HORIZONTAL DI INDONESIA STUDY TERHADAP 33 PROVINSI PERIODE TA 2009-2013

Deni Herdiyana \*)

\*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan RI

*Abstract: The study was conducted to determine the relationship between the General Allocation Fund (DAU) and the Specific Allocation Fund (DAK) with the horizontal gap level (Gini Ratio). This study uses secondary data from various sources, including the Gini ratio taken from the BPS database while the realization of DAU and DAK transfers is taken from Audited Financial Statements (BUN BA-999.05) for the 2009-2013 FY Period by carrying out research tools through SPSS Statistics 23.*

*This study results is that there is a strong relationship between the realization of DAU and DAK towards horizontal disparity, which is indicated by the Pearson Correlation figure which shows an increase from 0.316 in FY 2009 to 0.418 in FY 2013 for DAU, and an increase from 0.219 in FY 2009 to 0.316 in FY 2013 for DAK. Furthermore, a significant 2-tailed explanation shows that there is a stronger relationship between the DAU and the horizontal gap compared to the relationship between the DAK and the horizontal gap.*

*The researcher recommends that the portion of the DAU allocation intended for people's welfare should be further improved and there is a need for further evaluation and supervision of the absorption of DAK by the Regional Government so that the implementation of the use of these funds is targeted and more accountable.*

**Keywords:** DAU, DAK, Horizontal Gap

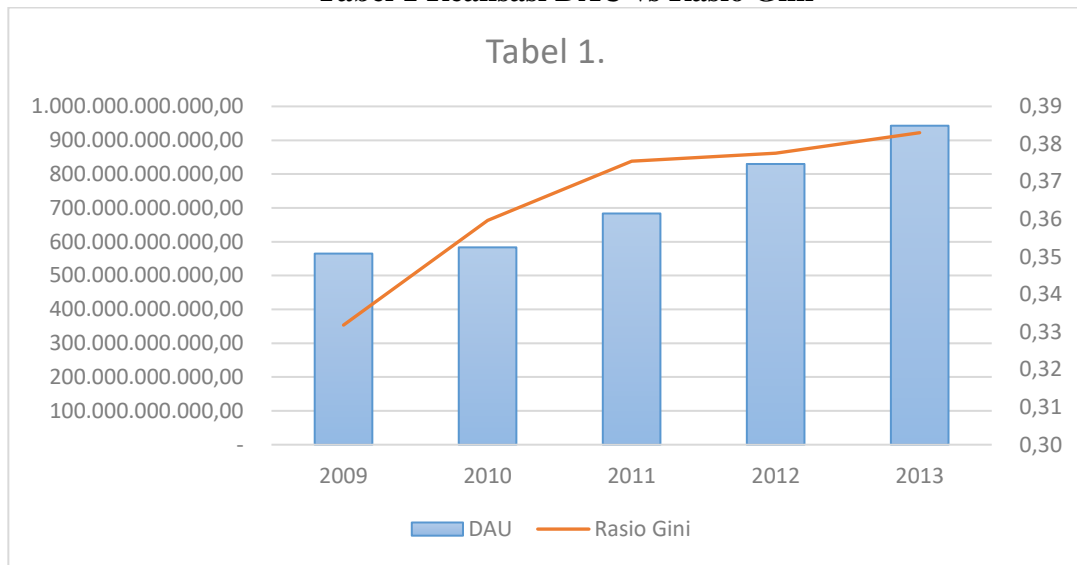
## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan dalam rangka untuk mengatasi *horizontal fiscal imbalance* dan *vertical fiscal imbalance*. Ketimpangan tersebut diakibatkan oleh adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Instrumen untuk mengatasi *horizontal fiscal imbalance* adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan instrumen untuk mengatasi *vertical fiscal imbalance* adalah Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun demikian, *Horizontal fiscal imbalance* yang diukur dengan Rasio Gini dalam periode 1981-1996 menyatakan bahwa pemerataan distribusi pendapatan masyarakat Indonesia tidaklah baik, tetapi sudah termasuk dalam kategori yang moderat meskipun masih pada angka yang relatif masih rendah dan kedepannya cenderung akan meningkat (Menurut Kamaluddin, 2000).

DAU dan DAK yang ditransfer sejak berlakunya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal tahun 2001, belum bisa mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut ditandai dengan adanya tren peningkatan rasio Gini periode tahun 2009-2013, yang sebanding dengan peningkatan realisasi transfer DAU dan DAK periode tahun 2009-2013 sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2.

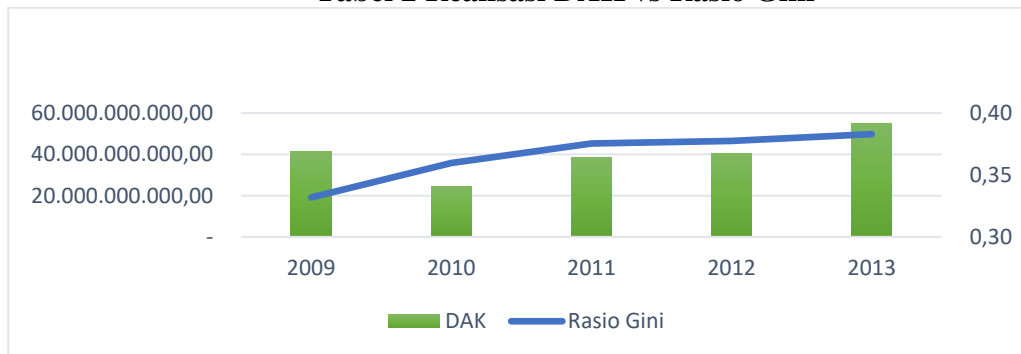
**Tabel 1 Realisasi DAU vs Rasio Gini**



Tabel 1 menggambarkan adanya peningkatan penyaluran DAU setiap tahunnya periode 2009-2013 dari sebesar Rp564,89 miliar (rata-rata DAU per provinsi) pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp942,85 miliar (rata-rata DAU per provinsi) pada tahun 2013, sedangkan

untuk Rasio Gini berbanding lurus dengan DAU dimana terdapat peningkatan dari tahun 2009 sebesar 0,33 (rata-rata Rasio Gini per provinsi) menjadi sebesar 0,38 (rata-rata rasio Gini per provinsi) masing-masing pada tahun 2011-2013.

**Tabel 2 Realisasi DAK vs Rasio Gini**



Hal tersebut sama dengan tabel 2 yang menjelaskan mengenai perbandingan antara realisasi DAK dengan rasio Gini periode 2009-2013, dimana DAK berbanding lurus dengan Rasio Gini dan DAU yang meningkat untuk periode 2009-2013 kecuali untuk tahun 2010 terdapat penurunan secara signifikan menjadi Rp24,43 miliar yang semula sebesar Rp41,23 miliar pada tahun 2009, kemudian mulai tahun 2010

selalu ada peningkatan sampai dengan tahun 2013 menjadi sebesar Rp54,87 miliar.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut memotivasi penulis untuk mengetahui bagaimana caranya agar transfer DAU dan DAK dapat mengurangi ketimpangan horizontal di wilayah Indonesia khususnya masing-masing provinsi.

**Tujuan**

1. Menemukan hubungan realisasi DAU terhadap ketimpangan horizontal;
2. Menemukan hubungan realisasi DAK terhadap ketimpangan horizontal;
3. Menemukan solusi agar realisasi DAU dan DAK dapat mengurangi ketimpangan horizontal.

**LANDASAN TEORI****Rasio Gini**

Rasio gini ditemukan oleh Gini pada tahun 1912, rasio tersebut merupakan suatu ukuran ketimpangan terkait distribusi pendapatan di dalam suatu wilayah secara agregat yang angkanya berkisar antara nol hingga satu, dimana angka nol mencerminkan pemerataan yang sempurna sedangkan angka satu mencerminkan ketimpangan yang sempurna (Bellu & Liberati, 2006). Berikut tabel terkait tingkatan Rasio Gini:

**Tabel 3 Tingkatan Rasio Gini**

NILAI KOEFISIEN	DISTRIBUSI PENDAPATAN
< 0,4	Tingkat Ketipangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketipangan Sedang
>0,5	Tingkat Ketipangan Tinggi

**Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah (*horizontal imbalances*), sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah (*equalization grant*). Besaran pagu DAU nasional berdasarkan amanat UU 33/2004 ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto. PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah (DBH). Proporsi DAU untuk provinsi ditetapkan sebesar 10% dan untuk kabupaten/kota ditetapkan 90% dari besaran DAU secara nasional.

Sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAU sebagai salah satu komponen dana perimbangan dialokasikan berdasarkan atas formula yang memperhitungkan konsep Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF) atau disebut sebagai *Fiscal Gap*. *Fiscal Gap* suatu daerah adalah selisih antara Kebutuhan Fiskal (KbF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF) daerah tersebut. AD dihitung berdasarkan jumlah

dan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). KbF mencerminkan kebutuhan dana yang diperlukan oleh daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. KbF diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara KpF mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam mendanai pelaksanaan layanan dasar umum. KpF dalam perhitungan DAU adalah PAD dan DBH. Penyaluran DAU kepada daerah dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari besaran alokasi masing-masing daerah.

**Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005, DAK merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Kegiatan khusus yang didanai DAK adalah penyediaan/perbaikan sarana dan

prasarana pelayanan dasar masyarakat serta kegiatan yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

### **Hubungan antara DAU dan Ketimpangan Horizontal**

Menurut Mulyono (2012), transfer DAU dapat memperbaiki disparitas fiskal antar wilayah di Indonesia, hal tersebut ditandai dengan adanya penurunan atas indeks Williamson dari 0,613 pada tahun 2005 menjadi 0,533 pada tahun 2008, dimana setiap tahun transfer DAU mengalami peningkatan. Untuk wilayah provinsi, DAU hanya menyumbang sebesar 21% dari total anggaran pendapatan, sedangkan untuk kabupaten/kota DAU mempunyai peranan yang cukup besar yaitu penyumbang 61% dari total anggaran pendapatan.

Lebih lanjut, penelitian terkait korelasi antara DAU dengan ketimpangan horizontal di wilayah Provinsi Jambi pernah dilakukan oleh Zasriati dengan menggunakan *time series* tahun 2003-2010, dimana hasilnya adalah bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi mampu dijelaskan oleh variabel DAU. Nilai Koefisien DAU adalah sebesar -6,77 terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, sehingga apabila pendapatan DAU naik sebesar 10% dan variabel lain konstan maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 67,7% dari koefisien ketimpangan.

### **Hubungan antara DAK dan Ketimpangan Horizontal**

Hubungan antara DAK dengan ketimpangan horizontal untuk wilayah Provinsi Jambi *time series* tahun 2003-2010, dimana hasilnya adalah bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi mampu dijelaskan oleh variabel

DAK. Nilai Koefisien DAK adalah sebesar -4,23 terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, sehingga apabila pendapatan DAK naik sebesar 10% dengan syarat variabel lain konstan maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 42,3% dari koefisien ketimpangan (Zasriati, 2010).

### **Hipotesis**

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa hipotesis sebagai berikut:

#### **1. Hubungan antara transfer DAU dengan Rasio Gini**

Ho : Tidak terdapat hubungan antara transfer DAU dengan Rasio Gini

H1 : Terdapat hubungan antara transfer DAU dengan Rasio Gini

#### **2. Hubungan antara transfer DAK dengan Rasio Gini**

Ho : Tidak terdapat hubungan antara transfer DAK dengan Rasio Gini

H1 : Terdapat hubungan antara transfer DAK dengan Rasio Gini

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yaitu Rasio Gini diambil dari database BPS sedangkan realisasi transfer DAU dan DAK diambil dari lampiran Laporan Keuangan Transfer ke Daerah *Audited* Periode TA 2009-2013. Rasio Gini meliputi data yang terdiri dari 33 provinsi dengan *time series* lima tahun dengan periode TA 2009-2013, data tersebut belum mencakup Provinsi Kalimantan Utara karena provinsi tersebut baru pemekaran pada tahun 2014, sedangkan untuk variabel *independent* yang terdiri dari DAU dan DAK mencakup 33 provinsi di seluruh wilayah Indonesia yang memperoleh transfer DAU dan DAK periode 2009-2013 dimana data tersebut dapat

diandalkan kebenarannya karena telah melalui audit BPK.

**Metode Analisis Data**

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara variabel transfer DAU dengan variabel Rasio Gini serta mengetahui hubungan antara variabel transfer DAK dengan variabel Rasio Gini.

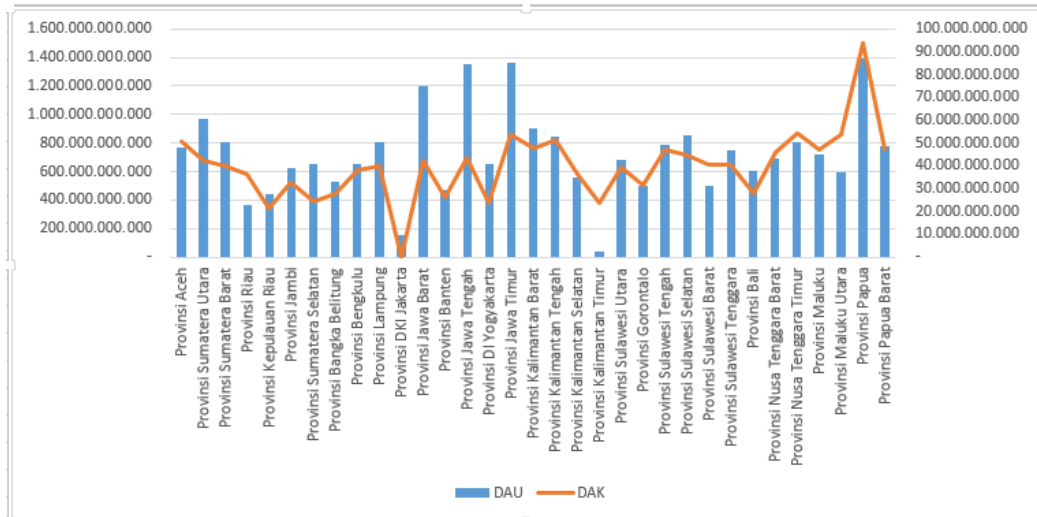
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Realisasi Transfer DAU dan DAK Periode 2009-2013**

Tabel 4 menjelaskan perbandingan rata-rata penerimaan transfer DAU dan

DAK pada masing-masing provinsi untuk periode 2009-2013. Provinsi Kalimantan Timur memperoleh rata-rata alokasi DAU paling sedikit dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebesar Rp 35,50 miliar, kemudian diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta yang memperoleh rata-rata alokasi DAU sebesar Rp 156,88 miliar. Hal tersebut karena Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi DBH yang besar terutama dari minyak bumi dan gas bumi, sedangkan Provinsi DKI Jakarta mempunyai PAD yang besar yaitu dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 4 Rata-rata Transfer DAU dan DAK TA 2009-2013**



Sementara itu, berdasarkan tabel 4 Indonesia bagian timur yang terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi NTT dan Provinsi Maluku Utara mendapatkan rata-rata alokasi DAK yang besar setiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan masih diperlukannya pembangunan sarana dan prasarana umum untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya.

**Hubungan realisasi DAU dan DAK terhadap Rasio Gini Periode 2009-2013**

Dalam rangka mencari hubungan antara realisasi DAU dan DAK dengan Rasio Gini, penulis menggunakan analisis korelasi melalui SPSS Statistics 23. Variabel yang dipilih adalah data kuantitatif, maka dalam analisa ini menggunakan Pearson Correlation, dimana dibuatkan 5 clusters untuk masing-masing tahun periode 2009-2013

**Tabel 5 Correlations Tahun 2009**

Variabel	Korelasi	DAU	DAK	RASIO_GINI
DAU	Pearson Correlation	1	,262	,316
	Sig. (2-tailed)		,135	,069
	N	34	34	34
DAK	Pearson Correlation	,262	1	,219
	Sig. (2-tailed)	,135		,212
	N	34	34	34
RASIO_GINI	Pearson Correlation	,316	,219	1
	Sig. (2-tailed)	,069	,212	
	N	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Untuk tahun 2009, dapat dilihat bahwa DAU dan Rasio Gini terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada  $\alpha = 10\%$  (2-tailed) sebesar 0,069.

Namun demikian, DAK memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan.

**Tabel 6 Correlations Tahun 2010**

Variabel	Korelasi	DAU	DAK	RASIO_GINI
DAU	Pearson Correlation	1	,715**	,307
	Sig. (2-tailed)		,000	,077
	N	34	34	34
DAK	Pearson Correlation	,715**	1	,292
	Sig. (2-tailed)	,000		,094
	N	34	34	34
RASIO_GINI	Pearson Correlation	,307	,292	1
	Sig. (2-tailed)	,077	,094	
	N	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Untuk tahun 2010, baik DAU maupun DAK memiliki hubungan yang positif dan signifikan pada  $\alpha = 10\%$  (2-

tailed) terhadap Rasio Gini masing-masing sebesar 0,077 dan 0,094.

**Tabel 7 Correlations Tahun 2011**

Variabel	Korelasi	DAU	DAK	RASIO_GINI
DAU	Pearson Correlation	1	,645**	,377*
	Sig. (2-tailed)		,000	,028
	N	34	34	34
DAK	Pearson Correlation	,645**	1	,337
	Sig. (2-tailed)	,000		,052
	N	34	34	34
RASIO_GINI	Pearson Correlation	,377*	,337	1
	Sig. (2-tailed)	,028	,052	
	N	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Untuk tahun 2011, baik DAU maupun DAK memiliki hubungan yang

positif terhadap Rasio Gini dan signifikan pada  $\alpha = 10\%$  (2-tailed) masing-masing

sebesar 0,028 dan 0,052, sedangkan pada  $\alpha = 5\%$  (2-tailed), hanya DAU yang

memiliki hubungan signifikan terhadap Rasio Gini.

**Tabel 8 Correlations Tahun 2012**

Variabel	Korelasi	DAU	DAK	RASIO_GINI
DAU	Pearson Correlation	1	,685**	,387*
	Sig. (2-tailed)		,000	,024
	N	34	34	34
DAK	Pearson Correlation	,685**	1	,368*
	Sig. (2-tailed)	,000		,032
	N	34	34	34
RASIO_GINI	Pearson Correlation	,387*	,368*	1
	Sig. (2-tailed)	,024	,032	
	N	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Untuk tahun 2012, DAU dan DAK memiliki hubungan yang positif terhadap Rasio Gini pada signifikan level 5% (2-tailed) masing-masing sebesar 0,024 dan 0,032. Hal tersebut mengindikasikan

terdapat peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terkait korelasi kedua variabel DAU dan DAK atas variabel Rasio Gini.

**Tabel 9 Correlations Tahun 2013**

Variabel	Korelasi	DAU	DAK	RASIO_GINI
DAU	Pearson Correlation	1	,900**	,418*
	Sig. (2-tailed)		,000	,014
	N	34	34	34
DAK	Pearson Correlation	,900**	1	,316
	Sig. (2-tailed)	,000		,069
	N	34	34	34
RASIO_GINI	Pearson Correlation	,418*	,316	1
	Sig. (2-tailed)	,014	,069	
	N	34	34	34

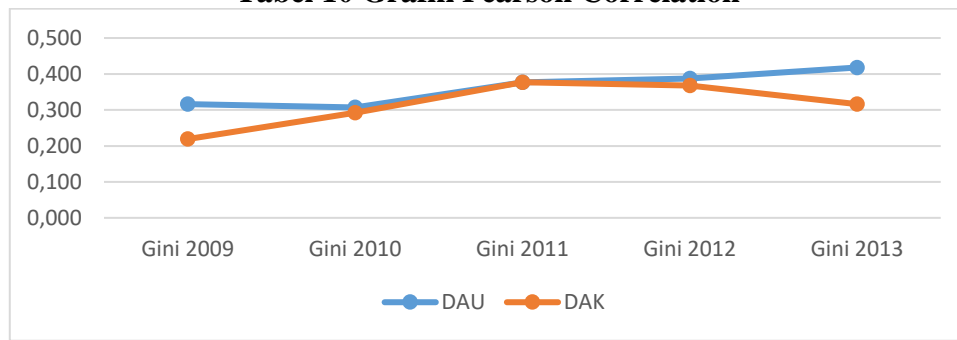
\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Untuk tahun 2013, terdapat kesamaan tren dengan tahun 2011, DAU dan DAK memiliki hubungan yang positif terhadap Rasio Gini dan signifikan pada  $\alpha = 10\%$  (2-tailed) masing-masing

sebesar 0,14 dan 0,69, sedangkan pada  $\alpha = 5\%$  (2-tailed), hanya DAU yang memiliki hubungan signifikan terhadap Rasio Gini.

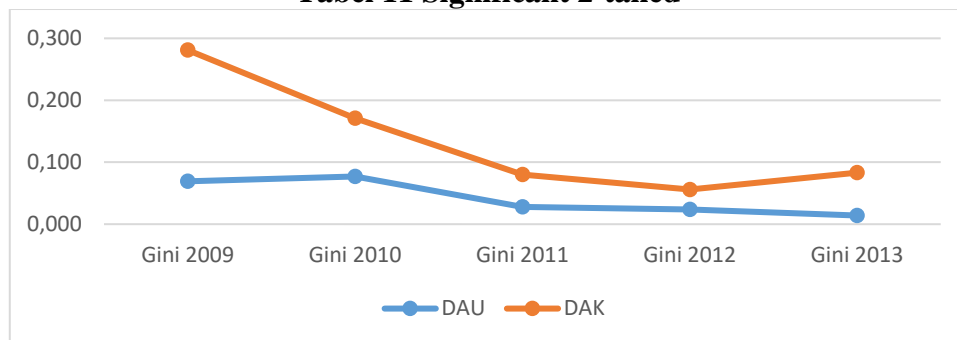
**Tabel 10 Grafik Pearson Correlation**



Berdasarkan grafik di atas, periode 2009-2010 korelasi Pearson menjelaskan bahwa hubungan DAU dengan Rasio Gini lebih kuat daripada hubungan DAK

dengan Rasio Gini, kecuali untuk tahun 2011 rasio korelasi Pearson memiliki nilai yang sama untuk DAU dan DAK.

**Tabel 11 Significant 2-tailed**



Sesuai grafik di atas, untuk periode 2009-2010 hanya DAU yang memiliki hubungan signifikan dengan Rasio Gini, sedangkan untuk periode 2011-2013, DAU mempunyai hubungan positif signifikan atas Rasio Gini pada level  $\alpha = 5\%$  (2-tailed), sementara itu dengan periode yang sama DAK memiliki hubungan positif signifikan pada  $\alpha = 10\%$  (2-tailed).

menunjukkan peningkatan dari 0,316 pada TA 2009 menjadi 0,418 pada TA 2013. Adapun *Pearson Correlation* antara DAK dengan kesenjangan horizontal menunjukkan peningkatan tetapi tidak sebesar DAU yaitu sebesar 0,219 pada TA 2009 menjadi 0,316 pada TA 2013, dimana puncaknya sebesar 0,337 pada TA 2011. Selanjutnya terjadi penurunan pada TA 2012 dan TA 2013 masing-masing sebesar 0,368 dan 0,316.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Secara keseluruhan untuk periode TA 2009-2013, hubungan DAU dan DAK terhadap kesenjangan horizontal adalah kuat. Hal tersebut ditandai dengan angka *Pearson Correlation* antara DAU dengan kesenjangan horizontal

Berdasarkan *significant 2-tailed*, korelasi transfer DAU terhadap kesenjangan horizontal adalah lebih signifikan dibandingkan dengan korelasi transfer DAK terhadap kesenjangan horizontal tersebut. Hal tersebut ditandai dengan DAU yang memiliki hubungan positif signifikan atas Rasio Gini pada  $\alpha = 10\%$  (2-tailed) untuk TA 2009 dan TA

2010, selanjutnya memiliki hubungan positif signifikan pada level  $\alpha = 5\%$  (2-tailed) untuk periode TA 2011-2013. Sedangkan korelasi transfer DAK terhadap kesenjangan horizontal hanya memiliki hubungan positif signifikan atas Rasio Gini pada  $\alpha = 10\%$  (2-tailed) untuk TA 2011-2013.

#### Saran

1. Porsi alokasi DAU untuk kesejahteraan rakyat seyogyanya lebih ditingkatkan lagi dibandingkan dengan porsi untuk belanja pegawai dan administrasi pemerintahan daerah;
2. Perlu adanya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut atas penyerapan DAK oleh Pemerintah Daerah agar pelaksanaan penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Kamaluddin, Rustian. "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah", 2000, Sumatra Barat: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Bellu & Liberati, "*Inequality Analysis the Gini Index*", 2006, Italy: FAO & Institute of Economics.

Mulyono, "*the Impact of Fiscal Decentralization on Regional Economic Development in Indonesia for the Periods 2005-2008*", 2012, Japan: Committee of Ritsumeikan Asia Pasific University.

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah  
*Audited* TA 2009

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah  
*Audited* TA 2010

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah  
*Audited* TA 2011

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah  
*Audited* TA 2012

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah  
*Audited* TA 2013